BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Antara korporasi dengan manusia memiliki karakteristik yang berbeda. Bila manusia memiliki pikiran, kehendak, dan tangan sehingga bisa membunuh, memerkosa, dan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang, tidak demikian dengan korporasi. Karena itulah, penentuan tindak pidana oleh korporasi berbeda dengan kapan suatu tindak pidana dilakukan manusia. Tindak pidana korporasi selalu merupakan tindakan fungsional dan berbentuk delik penyertaan. Dengan karakteristik tindak pidana yang seperti itu, teori dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja harus didasarkan pada konsep yang berbeda dibandingkan dengan konsep yang berlaku untuk manusia.¹

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata corporate, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota – anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap – tiap anggota.² J.C Smith dan Brian Hogan mendefinisikan korporasi sebagai :

“A corporation is a legal person but it has no physical existence and cannot, therefore, act or form an intention of any kind except through

¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 145

² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: STIH, 1991, hlm. 19-20

its directors or servants. As each director or servant is also a legal person quite distinct from the corporation, it follows that a corporation's legal liabilities are all, in a sense, vicarious. This line of thinking is epitomized in the catchphrase "Corporations don't commit crimes; people do." (Terjemahan bebas: korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuai melalui direktor atau karyawannya. Direktor atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang – orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan).³

Istilah corporate crime atau tindak pidana korporasi sebenarnya merupakan perluasan dari istilah white collar crime, di mana istilah ini dipergunakan pertama kalinya untuk mengarakteristikan crime yang dilakukan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai orang yang pergi ke tempat kerja dengan berpakaian putih. Konsep ini lalu berkembang, di mana pengertian white collar crime kini telah bergeser dan menjadi suatu crime yang tidak lagi merujuk pada pekerjaan seseorang. White collar crime meliputi tindak pidana spesifik tertentu, yang kesemuanya terkait atau menyangkut masalah keuntungan keuangan. Mengingat perkembangan istilah yang bergeser tersebut. Corporate crime didefinisikan oleh R.C. Kramer, yang dikutip oleh Roman Tomasik yang dikutip oleh Hasbullah F. Sjawie :

"...criminal acts (of omission or commission which are the result of deliberate decision making (or culpable negligence) by persons who occupy structural positions within the organisation as corporate executives or managers. These decisions are organisational in that they are organisationally based-made in accordance with the operative goals (primarily corporate profits), standard operating procedures, and cultural

³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.Cit hlm. 147

norms of the organisation-and are intended to benefit the corporation itself."⁴

Salah satu doktrin dari pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *doctrine of vicarious liability*. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ajaran atau doktrin pengganti ini menunjukkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar dilakukan oleh pengurus dan pengurus benar bersalah, kemudian jika terbukti barulah pertanggungjawaban pidana itu dapat dibebankan secara vikarius kepada korporasi. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan lain bahwa manusia pelakunya (pengurus korporasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sedangkan korporasinya bebas (tidak harus bertanggungjawab).⁵

Dalam pemakaian asas *Vicarious Liability* terhadap korporasi akan membuat celah dan kesempatan agar korporasi tersebut tetap berjalan jikalau hanyalah pemimpin ataupun direktur yang dikenakan pertanggungjawaban pidana nya tersebut. Dalam penerapannya pemimpin dan direktur dari suatu perusahaan saja yang dapat dijadikan tersangka dari sebuah korporasi yang melakukan suatu peristiwa tindak pidana, korporasi yang lepas tanggungjawab maka tidak ada pencabutan izin, denda, ataupun hal yang merugikan untuk korporasi itu sendiri hanyalah kerugian untuk individu yaitu pemimpin atau direktur dari perusahaan tersebut. Selanjutnya Pasal 116 ayat (2) Undang-

⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 Hlm. 263

⁵ Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 62

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Asas *vicarious liability* terdapat dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁶, hal ini ditandai dengan kalimat “...tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut...”

Selain itu yang melakukan peristiwa tindak pidana pembakaran hutan tersebut adalah atasan dalam bagian perusahaan tersebut yang memberikan perintah kepada karyawan – karyawan atau suruhan yang dipekerjakan untuk melakukan pembakaran hutan secara ilegal yang dapat dihubungkan dengan Pasal 55(1) KUHP yang menyatakan :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh, melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya

⁶ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, hlm. 80

atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Fenomena pembakaran hutan oleh korporasi di Indonesia pada saat ini menjadi sesuatu hal yang marak terjadi di Indonesia. Dalam pembakaran hutan di Indonesia ini dilakukan secara ilegal oleh perusahaan – perusahaan yang ingin membuka lahan baru dengan cara membakar hutan secara sengaja. Perusahaan – perusahaan yang ingin membuka lahan tersebut akan melakukan pembakaran hutan dengan cara pengurus atau direktur korporasi tersebut yang mempunyai jabatan tinggi akan menyalahgunakan wewenang nya dan menyuruh orang – orang ataupun karyawan perusahaan tersebut untuk melakukan sebuah peristiwa tindak pidana pembakaran hutan secara sengaja. Kebakaran hutan membawa berbagai dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan makhluk hidup. Kerugian dari kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi sudah berdampak pada regional maupun internasional.

Dalam kasus nyata di Indonesia marak terjadi di Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT. Mekarsari Alam Lestari yang melakukan pembakaran hutan untuk kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit. Yang dijadikan terpidana dalam kasus ini adalah Suheri Terta Sebagai Direktur Utama PT. Mekarsari Alam Lestari serta Facruddin Lubis sebagai Manager Proyek PT. Mekarsari Alam Lestari yang dijatuhkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru dengan putusan nomor 235/PID.SUS/2012/PTR yang menyatakan bahwa kedua terdakwa ini secara sah bersalah. Suheri Terta

memerintahkan kepada Facruddin Lubis membuka dan menyiapkan lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan membuka lahan dengan cara *land clearing* berupa imas tumbang dimana sisa-sisa tegakan kayu dan semak belukar hasil land clearing yang sangat mudah terbakar disusun dalam bentuk rumpukan jalur (*stacking*) memanjang dari arah utara ke selatan dengan ketinggian lebih kurang 2 (dua) meter dan lebar lebih kurang 3 (tiga) meter diatas lahan blok yang akan ditanami kelapa sawit. Dengan memakai asas *Vicarious Liability* yang memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan perusahaan akan tetapi perusahaan ataupun korporasi tersebut masih dapat diberikan celah untuk tidak memberikan pencabutan izin ataupun denda kepada perusahaan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan tersebut. Sangatlah riskan dikarenakan perusahaan tersebut bisa melakukan pembakaran hutan kembali dengan pimpinan yang berbeda. Kedua terpidana ini akhirnya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan beserta dengan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kasus yang sama terjadi di Pekanbaru oleh PT. Jatim Jaya Perkasa yang menyeret Kosman Vitoni Immanuel Siboro sebagai Asisten Kepala Sei. Rokan yang dijatuhkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru dengan nomor putusan 186/PID.SUS/2015/PT.PBR yang merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap lahan yang terbakar seluas 120 Ha yang berada di Blok S.03D dan T.03D. Bahwa areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D terbakar didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit. Terdakwa Vitoni Immanuel Siboro akhirnya dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat tahun) beserta

pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Dilihat dari Pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya diterapkan sanksi administratif yang lebih menitikberatkan kepada teguran atau paksaan untuk pencabutan izin lingkungan dibandingkan dengan sanksi pidana yang hanya dapat dipertanggung jawabkan oleh satu orang saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Penerapan *Vicarious Liability* Terhadap Korporasi Atas Tindakan Pembakaran Hutan Ilegal Di Riau Dihubungkan Dengan Pasal 55 (1) KUHP Jo UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian atau secara singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*.⁷ Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yang harus dicari penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas pembakaran hutan secara ilegal?
2. Bagaimana penerapan asas *Vicarious Liability* untuk korporasi atas pembakaran hutan secara ilegal?

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, 1997, Raja Grafindo, hlm 17.

3. Bagaimana penegakan hukum untuk korporasi atas pembakaran hutan secara ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui dan mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas pembakaran hutan secara ilegal.
2. Ingin mengetahui dan mengkaji mengenai penerapan asas *Vicarious Liability* untuk korporasi atas pembakaran hutan secara ilegal.
3. Ingin mengetahui dan mencari solusi mengenai penegakan hukum untuk korporasi atas pembakaran hutan secara ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulis dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana yang fokus kepada tindak pidana pembakaran hutan secara ilegal yang dilakukan oleh korporasi;
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai

tindak pidana pembakaran hutan secara ilegal yang dilakukan oleh korporasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum;
- b. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep didalam pengklasifikasian pembakaran hutan secara ilegal oleh korporasi.

E. Kerangka Pemikiran

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari "*straf*" dan istilah "dihukum" berasal dari "*wordt gestraft*" merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Menurut Moeljatno, kalau kata "*straf*" diartikan

sebagai “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai hukuman - hukuman.⁸

Pasal 116 (2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan yang dimaksud dengan teori *Vicarious Liability* adalah :

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama – sama.”

Romli Atmasasmita menyatakan pendapatnya mengenai istilah *Vicarious Liability* bahwa:⁹

“*Vicarious Liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).”

Barda Nawawie menyatakan *Vicarious Liability* mempunyai arti bahwa :¹⁰

“Dalam pengertian vicarious liability ini walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai suatu kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggung jawabkan”

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 185

⁹Romli Atmasasmita, *Asas – Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989, hlm 93

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Banacipta, (Selanjutnya di sebut dengan Barda Nawawi Arief II), 1982, hlm 111.

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (1) (turut melakukan) menyatakan bahwa :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

R. Soesilo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) bahwa :¹¹

“Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.”

Pada saat ini masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan, oleh karena itu membutuhkan hukum untuk dapat memberikan perlindungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi masyarakat pasti menolak untuk diatur oleh hukum yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tersebut. Maka cara-cara untuk lebih mengadilkan, membenarkan, meluruskan, serta membumikan, hukum menjadi pekerjaan yang tidak dapat

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, 1991

ditawar-tawar lagi. Cara-cara tersebut dilayani oleh penafsiran terhadap teks-teks hukum.¹²

Hal tersebut sesuai dengan bunyi alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:¹³

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu: ¹⁴

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia meletakkan dasar tentang nilai kemanusiaan dan keadilan, hal ini tersurat dalam sila ke-2 dan ke-5 yaitu:

Sila ke-2 : “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Sila ke 5 : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

¹² Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Hukum Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.6

¹³ Pembukaan UUD 1945 alinea IV

¹⁴ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya:¹⁵

“Segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan.”

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstat) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara hukum dibedakan atas dua ciri-ciri dari Negara formal menurut AV Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri:¹⁶

1. Supremasi Hukum, dalam arti tidak ada kesewenang – wenangan;
2. Kedudukan yang sama didepan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat;
3. Terjaminnya hak – hak manusia oleh Undang – undang.

S.F Marbun menyatakan bahwa negara hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil, sebagaimana dinyatakan bahwa:¹⁷

¹⁵ I Gede Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 304-305

¹⁷ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminstratif di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 8

“Negara yang berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah yang demokratis, didasarkan atas kehendak rakyat, sesuai kesadaran hukum rakyat. Sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan.”

Untuk mewujudkan suatu peraturan berjalan efektif, ada beberapa faktor yang dapat menunjang peraturan tersebut agar berjalan secara efektif, salah satunya yaitu faktor penegak hukum, Soerjono soekanto mengatakan bahwa:¹⁸

“Ada faktor lain yang menunjang peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif. Faktor penegak hukum yang paling sentral dibanding dengan faktor-faktor yang lain. Hal ini disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas.”

Undang-Undang Dasar telah memberikan jaminan pelaksanaan penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, ctk Keempat, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 55

dikutip dari buku Anthon F. Susanto, Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.¹⁹

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk menggambarkan fakta berupa data realita lapangan dan analisis dengan menggunakan bahan primer, tersier dan sekunder yang ada di perpustakaan.²⁰

Fakta dan gambaran yang hendak dilukiskan dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan *vicarious liability* dalam korporasi atas pembakaran hutan secara ilegal. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji tentang kajian yuridis mengenai penerapan *vicarious liability* terhadap korporasi atas pembakaran hutan ilegal dihubungkan dengan pasal 55 (1) KUHP Jo Undang – undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan-permasalahan dalam kegiatan penelitian ini adalah

¹⁹ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 159-160.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.

metode pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis.²¹ Maksudnya yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teori atau konsep dan metode analitis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis. Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan pula.²²

3. Tahap Penelitian

a. Untuk mencari konsep-konsep, teori-teori serta pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan kepustakaan, yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
amandemen keempat;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm 13

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia grup, Jakarta, 2005, hlm.

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu : ²³

“Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi”.

Dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, makalah, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penerapan *vicarious liability* terhadap korporasi atas pembakaran hutan ilegal.

3) Bahan hukum tersier menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu : ²⁴

“Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.”

b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, OP. cit hlm.52.

²⁴ Ibid, hlm.53.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan relevansi teori *vicarious liability* terhadap korporasi atas pembakaran hutan secara ilegal. Alat yang dipergunakan oleh peneliti adalah alat tulis berupa bolpoin, pensil, buku catatan, flashdisk, kamera dan alat perekam dalam penelitian melalui wawancara.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, Nampak analisis memiliki kaitan dengan pendekatan masalah. Adapun dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan secara yuridis-kualitatif. Menurut Ronny Hanitoyo Soemitro, analisis data secara yuridis kualitatif adalah “Cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika”.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan *Online* (Elektronik).

8. Jadwal Penelitian

TAHUN	2017					
BULAN	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus
1. Persiapan penyusunan UP						
2. Seminar UP						
3. Penelitian, pengumpulan data dan pengolahan data						
4. Penyusunan hasil penelitian kedalam bentuk penulisan hukum						
5. Sidang						

Komprehensif						
6. Revisi, penjilidan dan Pengesahan						

*Sewaktu-waktu dapat berubah